



Dadang Solihin



Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD



Dialog Rektor dengan DPRD dan Bappeda Kabupaten Lembata-NTT
Ibis Mangga Dua Hotel-Jakarta, 9 Desember 2015

BINTEK MENINGKATKAN KAPASITAS DPRD

" Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Terkait Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah "

DPRD KABUPATEN LEMBATA

HOTEL IBIS MANGGA DUA JAKARTA, 7 - 10 2015





DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email
dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web:
<http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Rencana Strategis SKPD
- Rencana Kerja SKPD
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN: Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi NTT





Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas



Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:

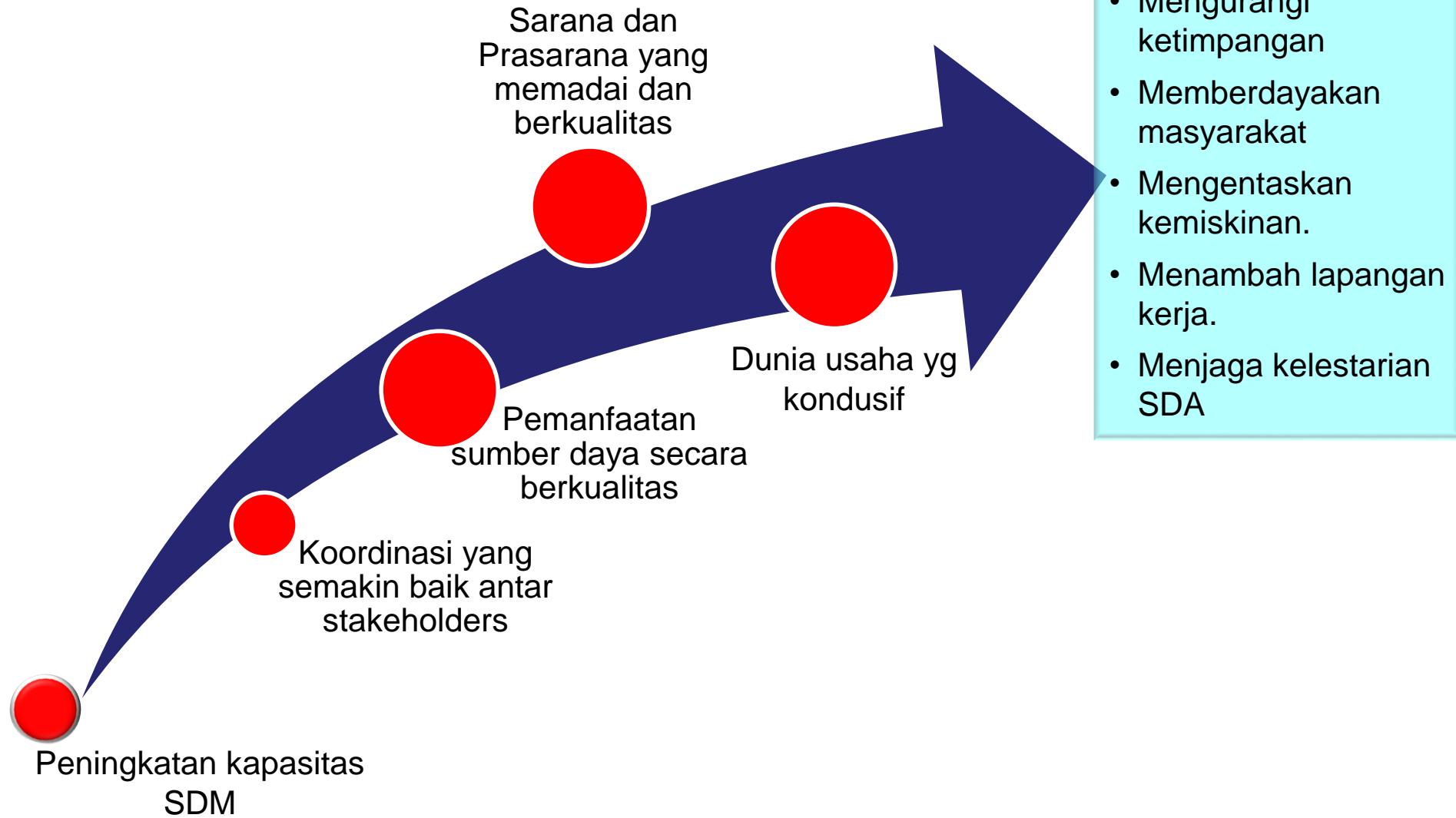
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi
Daerah

Pengelolaan
Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.

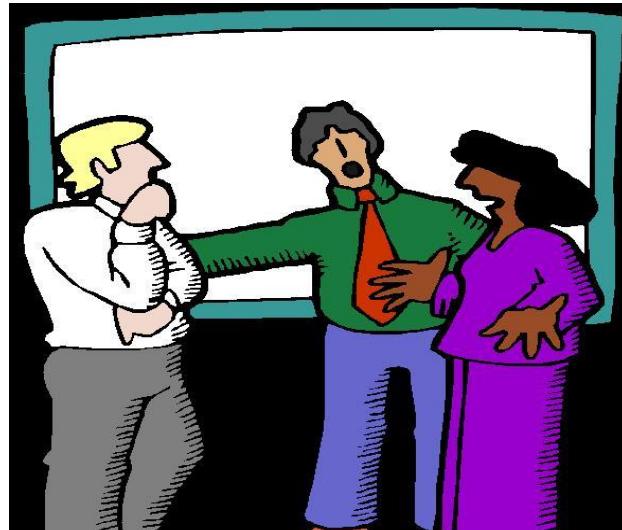
Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.

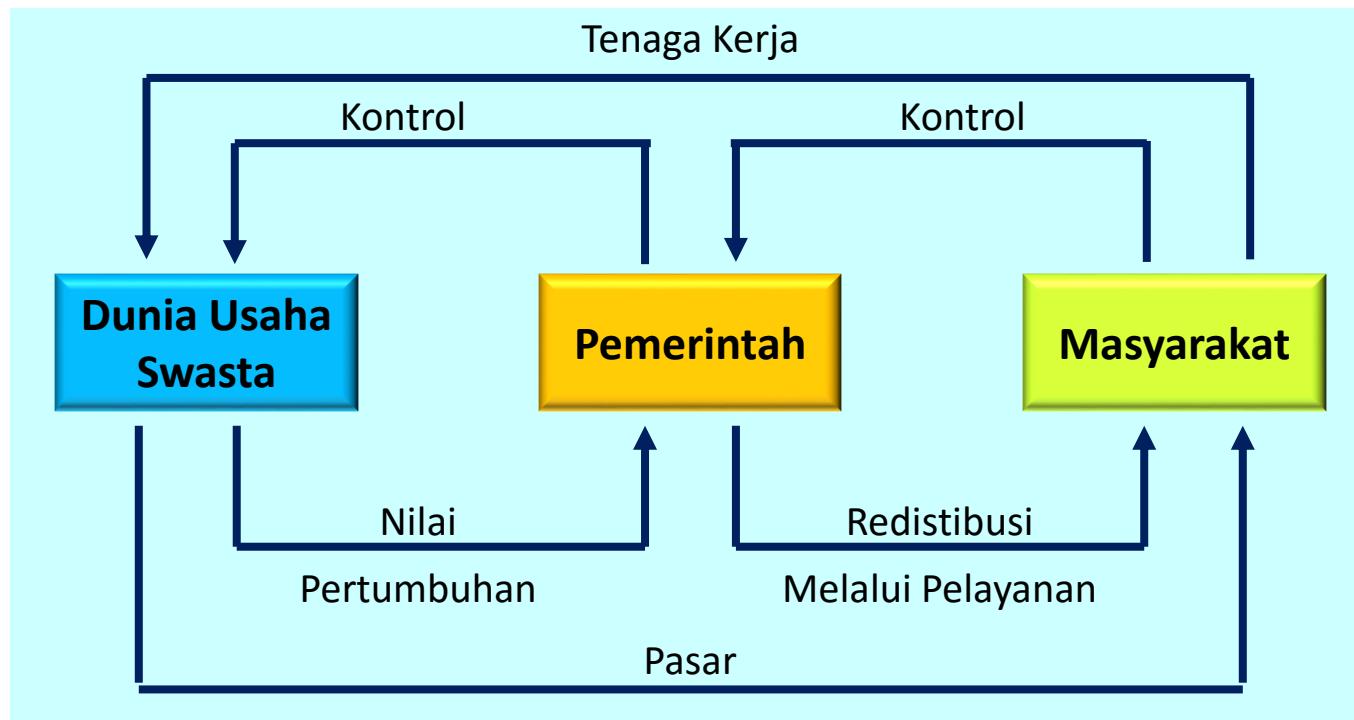
Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government	Governance
<ul style="list-style-type: none">■ Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,■ Aktor di luaranya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.	<ul style="list-style-type: none">■ Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, <i>civil society</i> dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

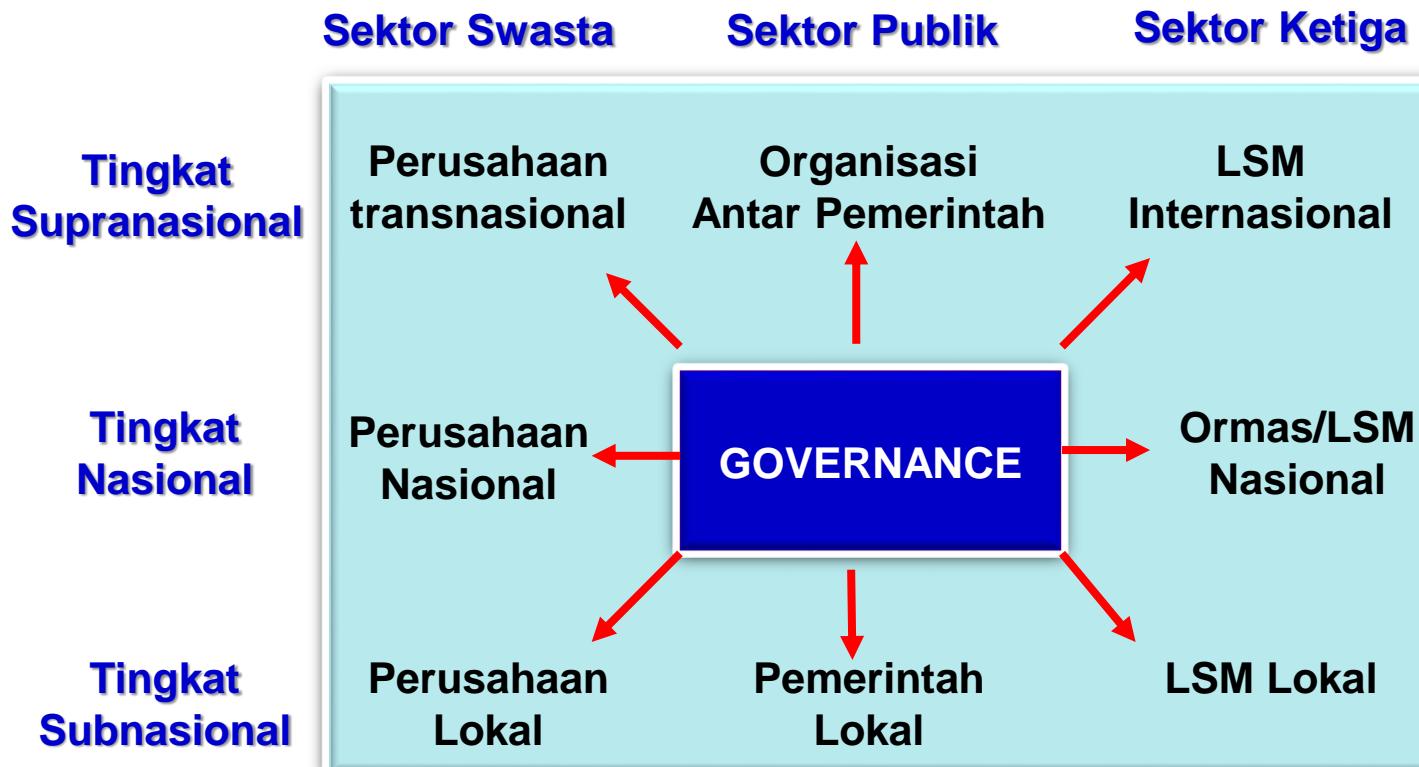
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

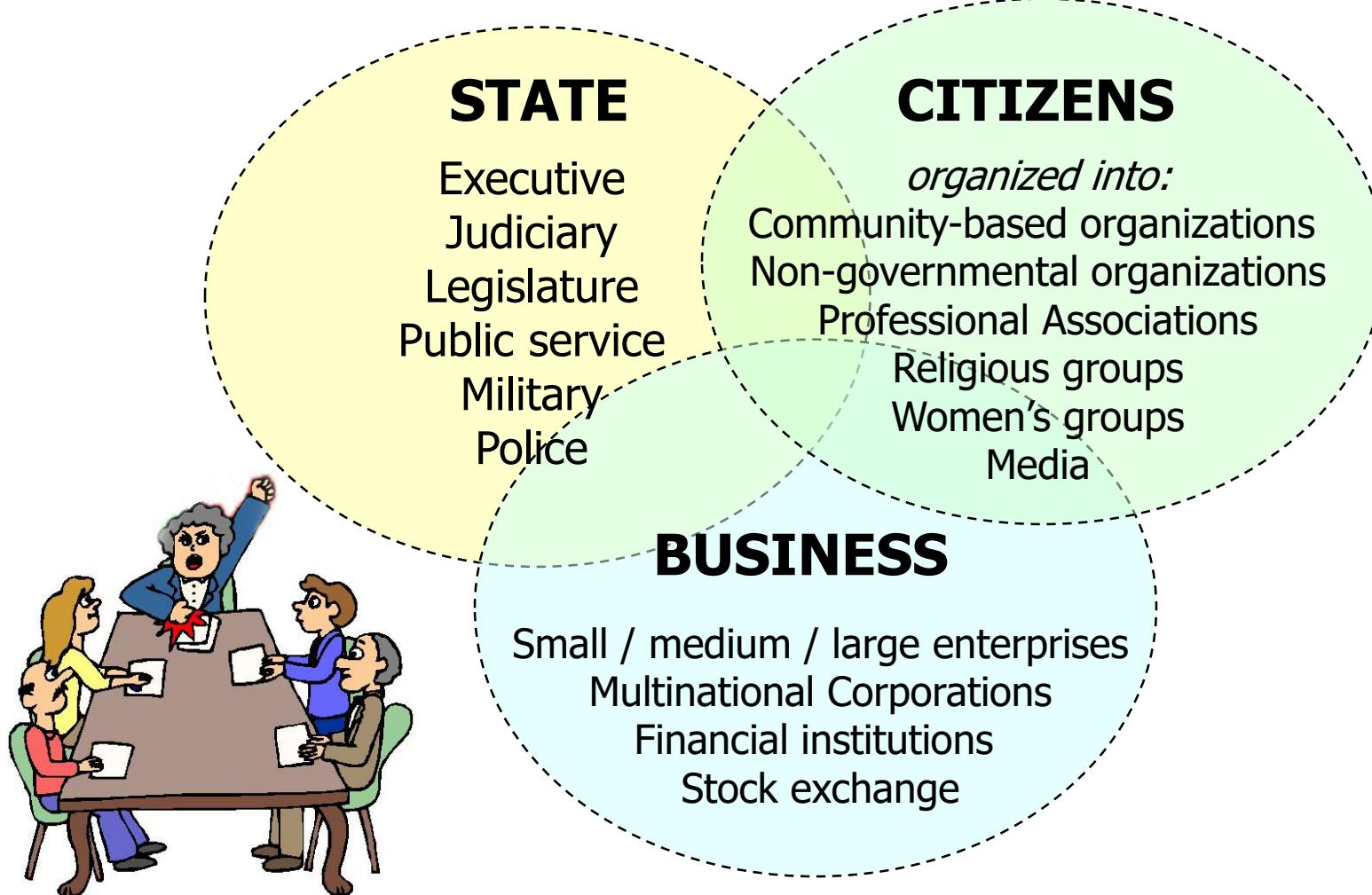


- Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

Model Governance



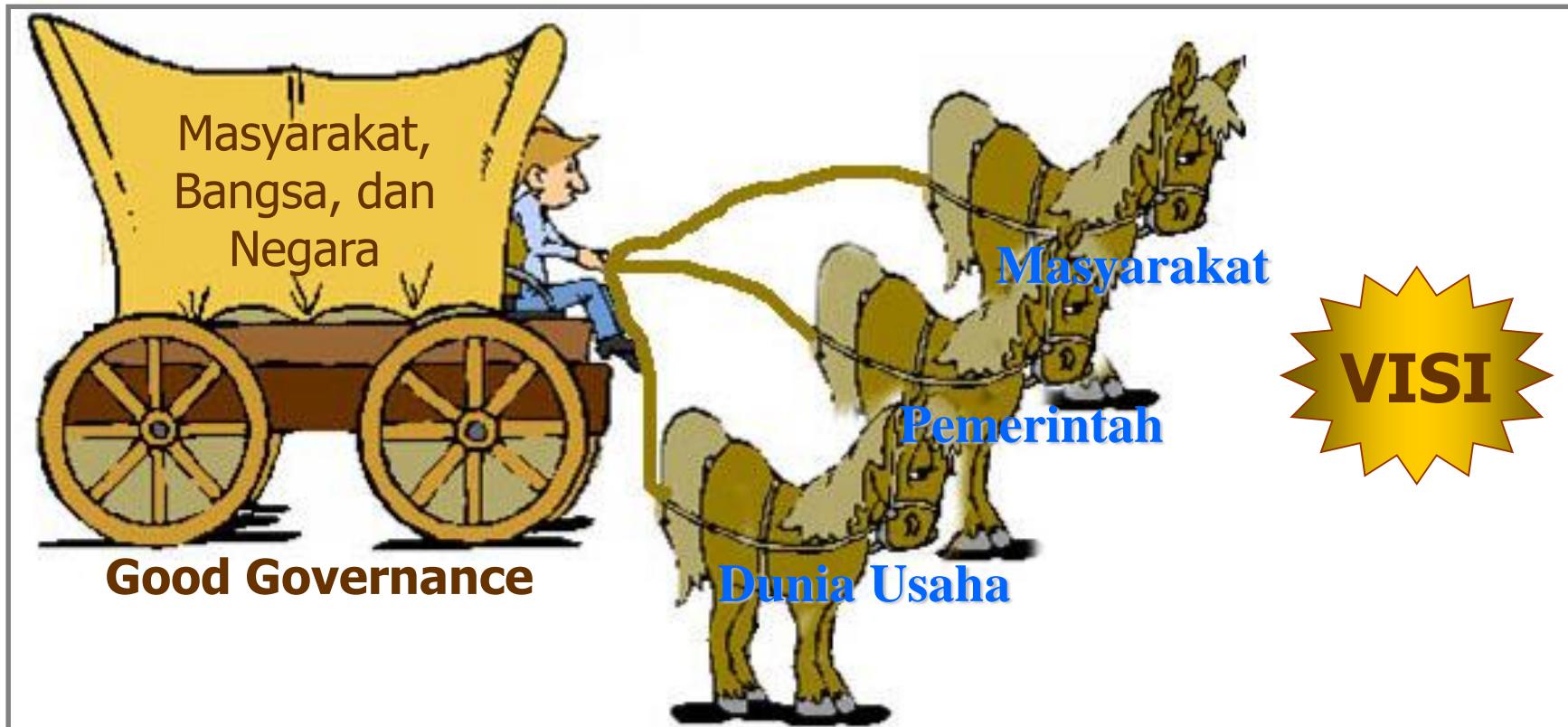
Pelaku Pembangunan: Stakeholders



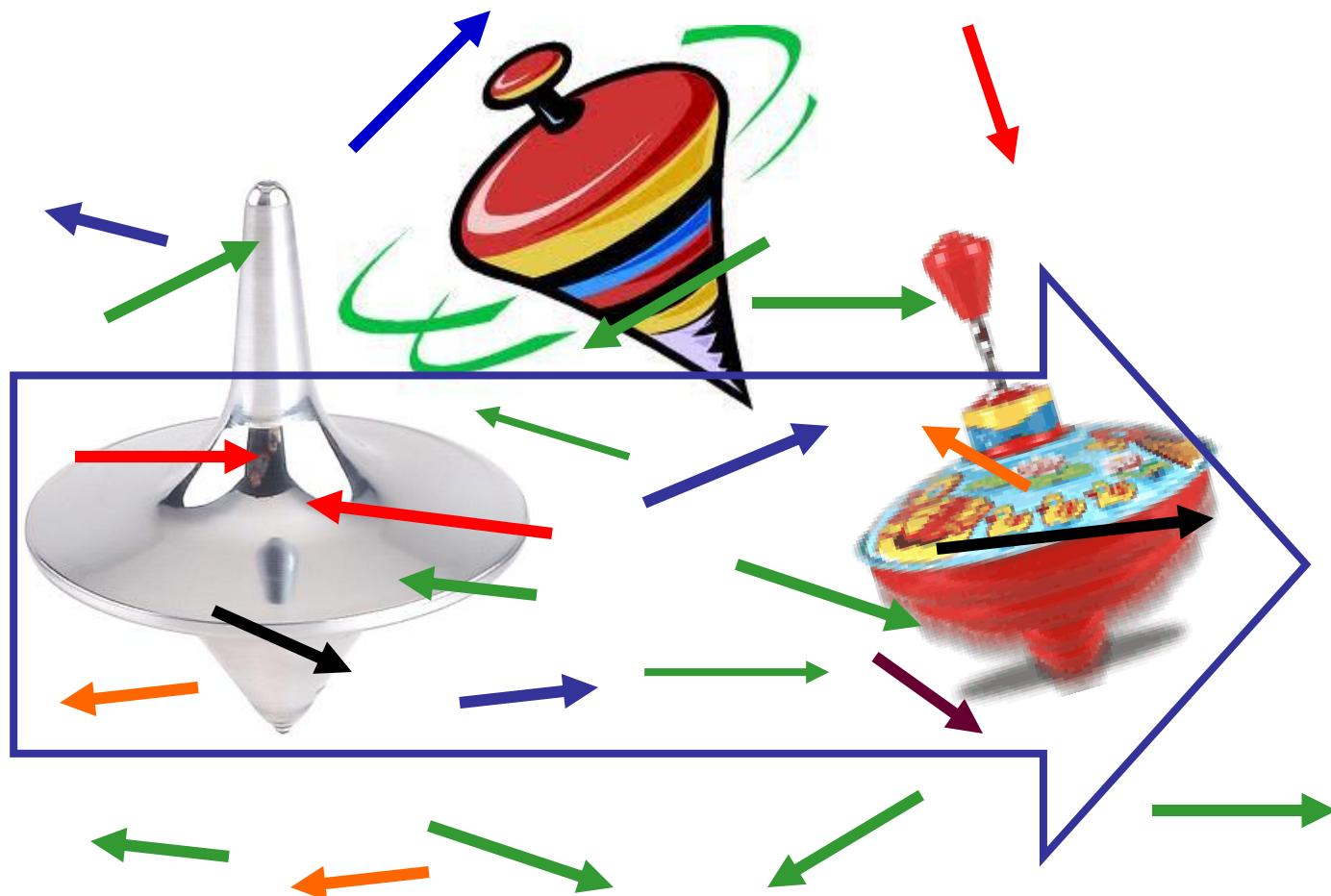
Troika



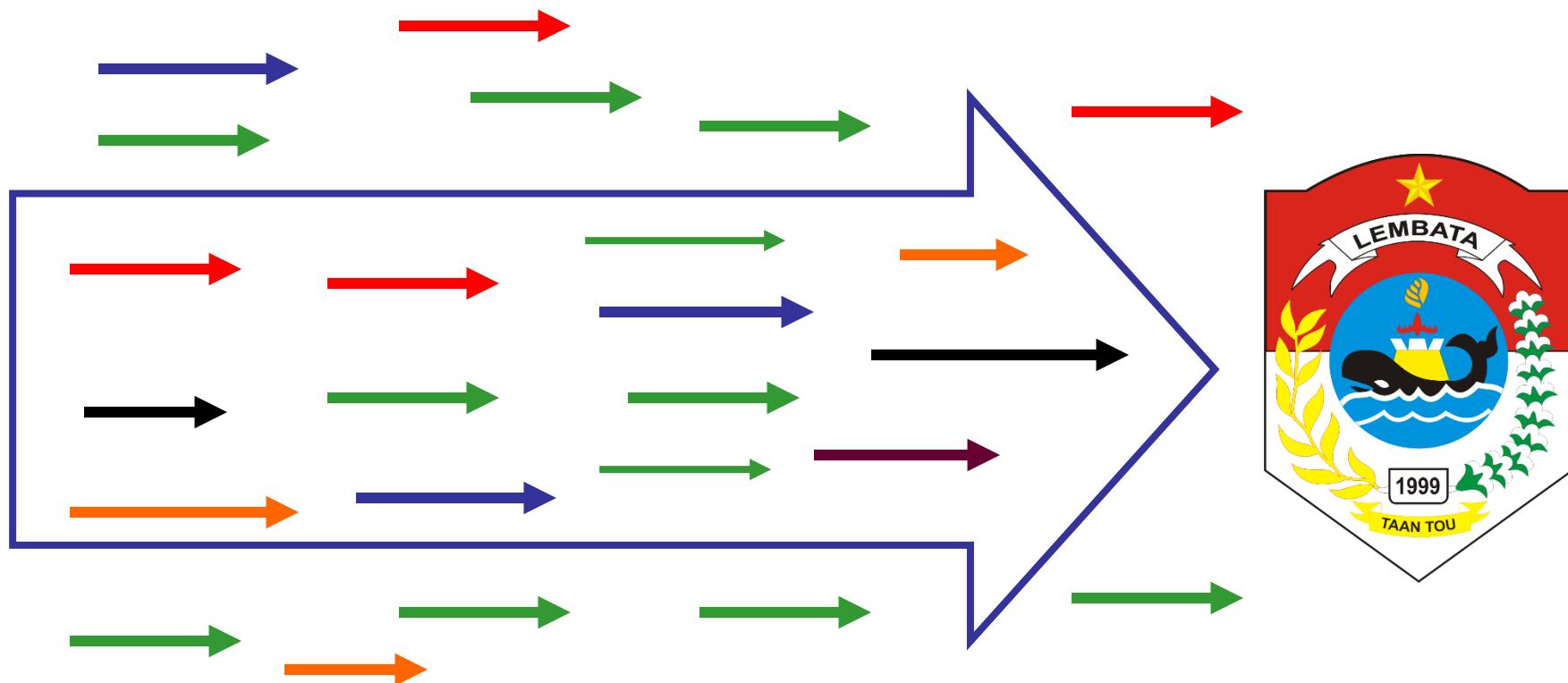
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi Stakeholders





Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Apa itu RPJPD

- RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Apa itu RPJPD

- Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,
- Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:
 - analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,
 - pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan,
 - kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan
- akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.

Apa itu RPJPD

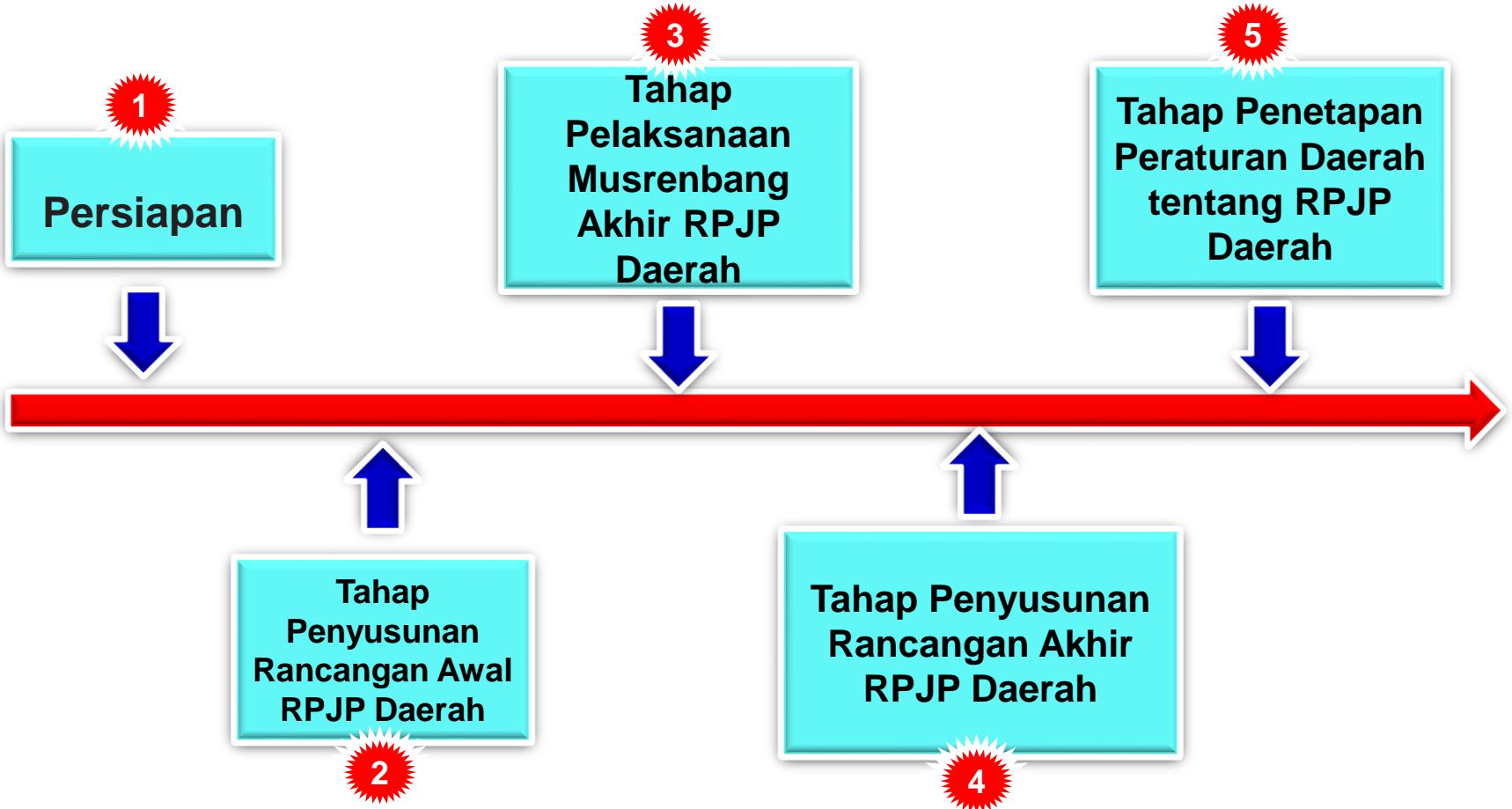
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Substansi RPJPD

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

Step by Step Penyusunan RPJPD



Step by Step Penyusunan RPJPD

I.Tahap Persiapan

1. Orientasi perencanaan daerah
2. Pembentukan tim penyusun RPJPD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
4. Identifikasi stakeholder
5. Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJPD
7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJPD
8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD
9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJPD

Step by Step Penyusunan RPJPD

2/3

II. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

1. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
9. Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
10. FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
11. Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD

Step by Step Penyusunan RPJPD

3/3

III. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah

- Musrenbang RPJPD
- Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah

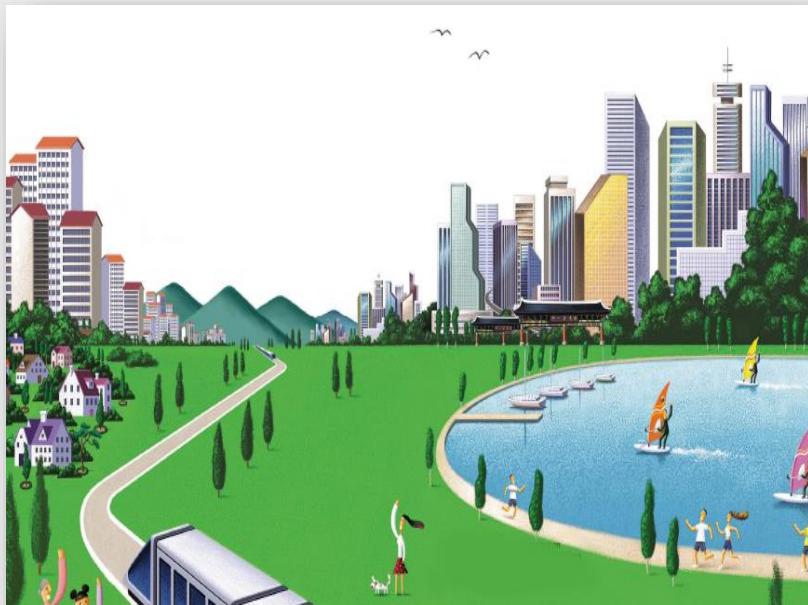
IV. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah

- Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
- Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD

V. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah

- Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
- Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
- Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD
- Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD
- Penetapan Ranperda menjadi PERDA
- Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD
- 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD
 - UU No 25/2004
 - UU No 32/2004
 - SE Mendagri No 050/2020/SJ
- 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - RPJP Nasional
 - RPJP Provinsi
 - RTRW Nasional
 - RTRW Provinsi
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini
 - 2.1.1 Pelayanan umum
 - 2.1.2 Ketertiban dan keamanan
 - 2.1.3 Ekonomi
 - 2.1.4 Lingkungan hidup

- 2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum
- 2.1.6 Kesehatan
- 2.1.7 Pariwisata dan budaya
- 2.1.8 Pendidikan
- 2.1.9 Perlindungan sosial
- 2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.2.2 Demografi
 - 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik
 - 2.2.5 Prasarana dan Sarana
 - 2.2.6 Pemerintahan
- 2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan
 - 2.3.1 Pelayanan umum
 - 2.3.2 Ketertiban dan keamanan
 - 2.3.3 Ekonomi
 - 2.3.4 Lingkungan hidup
 - 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum
 - 2.3.6 Kesehatan
 - 2.3.7 Pariwisata dan budaya
 - 2.3.8 Pendidikan
 - 2.3.9 Perlindungan sosial

Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang
 - 3.3.1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang
 - 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah

Bab IV PENUTUP

Lampiran

Evaluasi Kualitas RPJPD

1. Dokumen RPJPD sudah SMART	✓ .
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah	✓ .
3. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini	✓ .
4. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat ini	✓ .
5. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor-faktor eksternal di masa depan	✓ .

Evaluasi Kualitas RPJPD

6. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah	✓ .
7. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depan	✓ .
8. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam semua tahapan proses penyusunan RPJPD	✓ .
9. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam jaringan aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD	✓ .



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Apa itu RPJMD

- RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepertutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:
 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Apa itu RPJMD

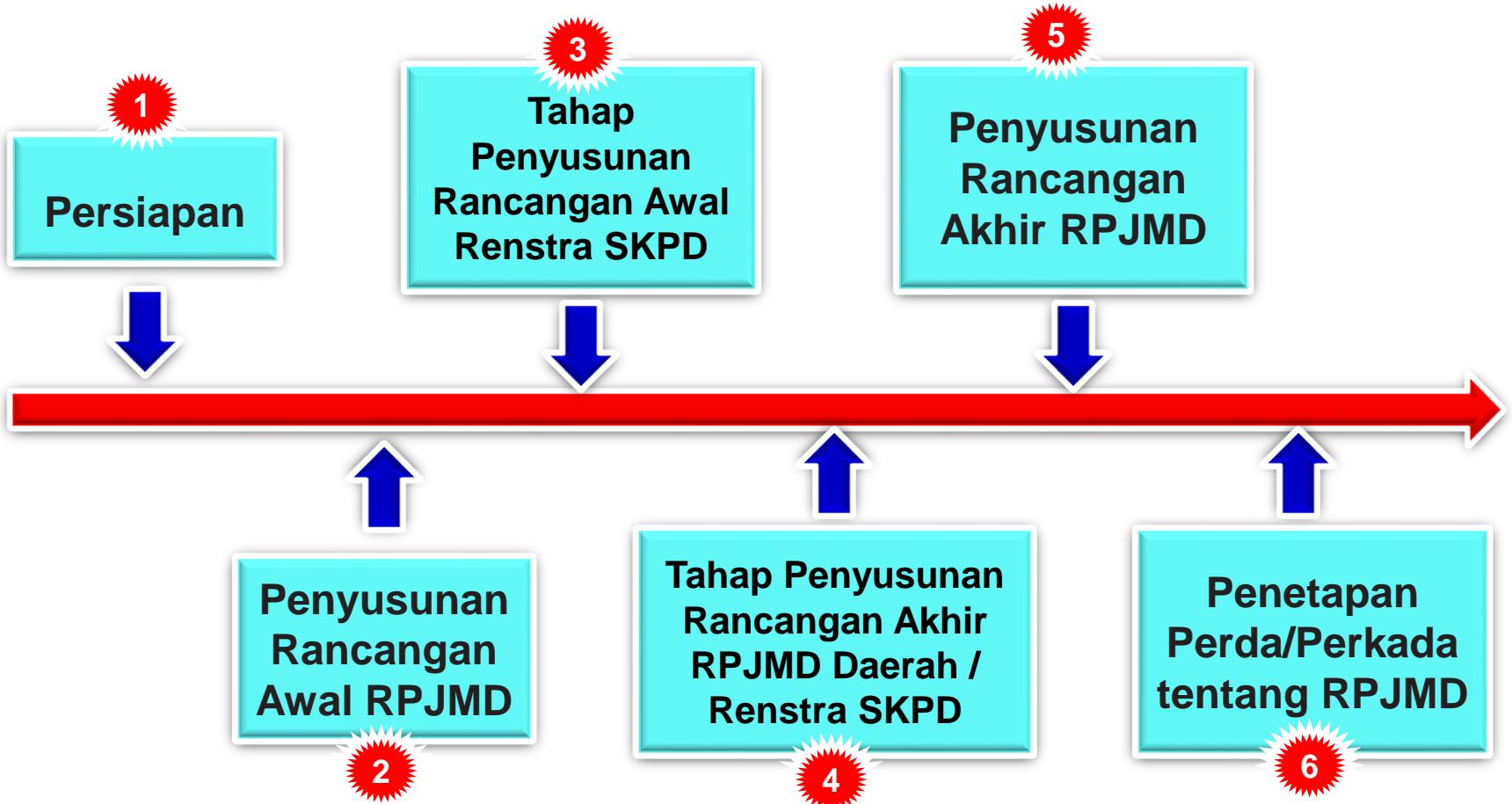
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Substansi RPJMD

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

Step by Step Penyusunan RPJMD



Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahannya)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

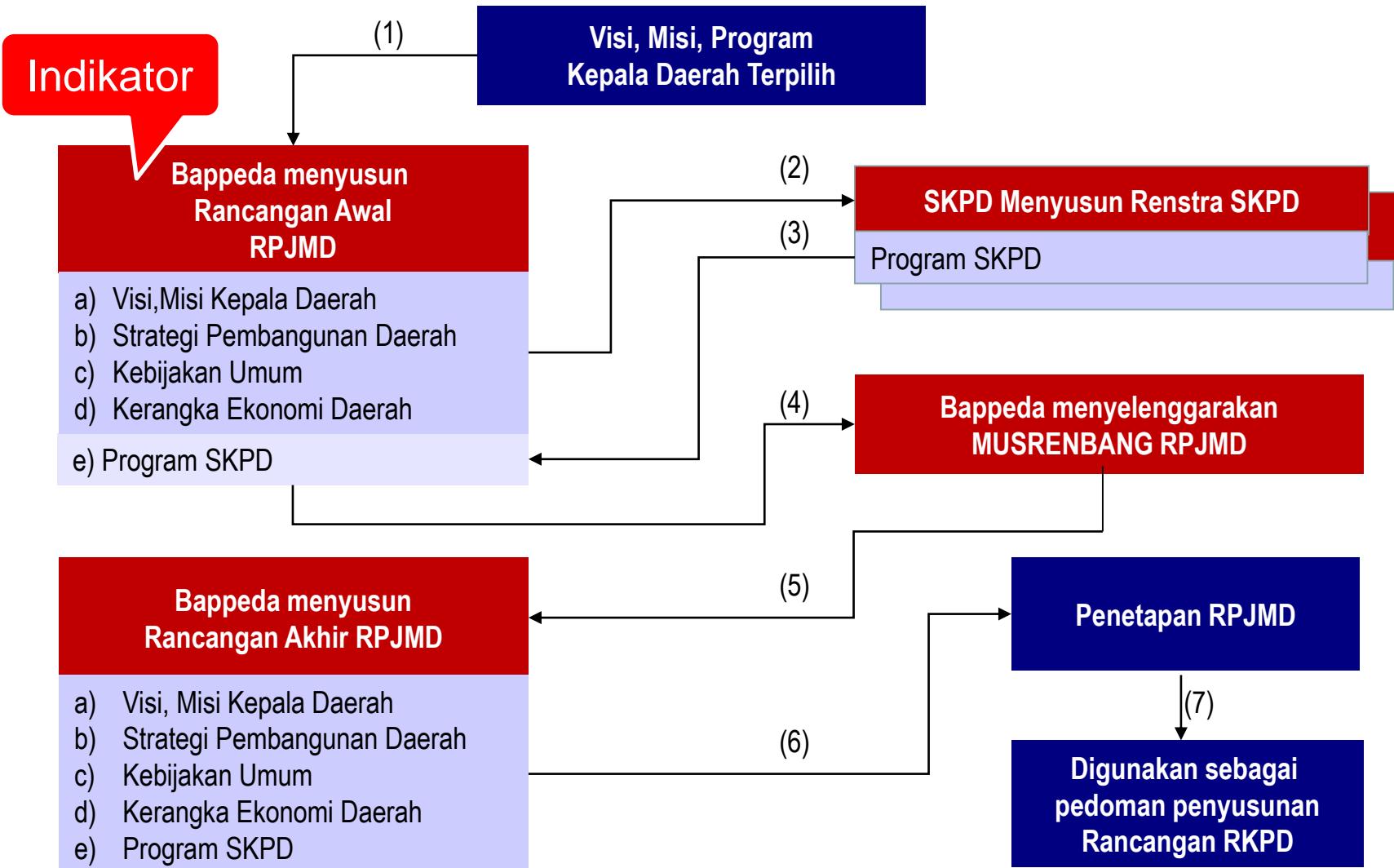
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

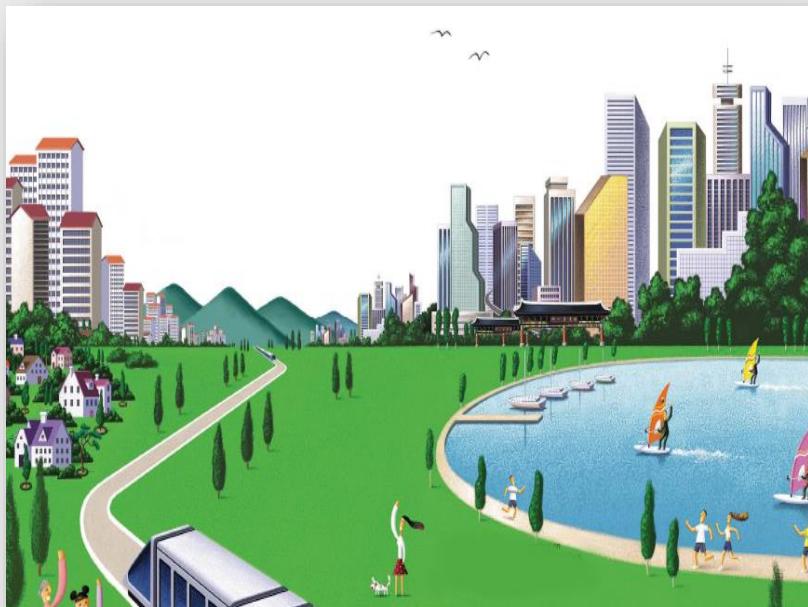
Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

Langkah Penyusunan RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

- 2.1 Kondisi Geografis Daerah
- 2.2 Pelayanan Umum
- 2.3 Ketertiban dan Ketentraman
- 2.4 Ekonomi
- 2.5 Lingkungan Hidup
- 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
- 2.7 Kesehatan
- 2.8 Pendidikan

Sistematika Penulisan RPJMD

- 2.9 Pariwisata dan Budaya
- 2.10 Pendidikan
- 2.11 Perlindungan sosial
- 2.12 Keuangan Daerah
- 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

- 3.1 RPJM Nasional
- 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)
- 3.3 RPJM Provinsi
- 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Strategi
- 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah)
- 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan Daerah

Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

- 6.1 Program Pembangunan
 - 6.1.1 Program SKPD
 - 6.1.2 Program Lintas SKPD
 - 6.1.3 Program Lintas Kewilayah

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas *Non Government Stakeholders* untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun Ialu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Contoh: Outline RPJMD DKI

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Landasan Hukum
- Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- Kondisi Geografis
- Kondisi Demografi
- Sumber Kekayaan Alam
- Kondisi menurut Aspek Kehidupan
- Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

BAB III VISI DAN MISI

- Visi
- Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

- Tujuan Pembangunan Daerah
- Strategi Pembangunan Daerah
- Pendekatan

BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

- Urusan Wajib
- Urusan Pemerintahan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

- Umum
- Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- Arah Kebijakan Belanja Daerah
- Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Program Dedicated
- Program menurut Urusan Pemerintahan
- Program Kewilayahannya

BAB VIII PENUTUP

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-----|
| 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah | ✓ . |
| 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah | ✓ . |
| 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>) | ✓ . |

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|---|-----|
| 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>) | ✓ . |
| 5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. | ✓ . |
| 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. | ✓ . |

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah <u>sesuai dengan</u> rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Rumusan program pembangunan daerah <u>sesuai dengan</u> kendala fiskal daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Kualitas RPJMD sudah SMART | <input checked="" type="checkbox"/> |



Rencana Strategis SKPD

Apa Itu Renstra SKPD

- Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

Apa Itu Renstra SKPD

- Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
 - 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam **lima tahun** mendatang;
 - 2) Bagaimana mencapainya;
 - 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
- Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Outline Renstra SKPD

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40 PP 8/2008

Sistematika Penulisan Renstra SKPD

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
- 2.3 TUPOKSI
- 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

- 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)
- 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal
- 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
- 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

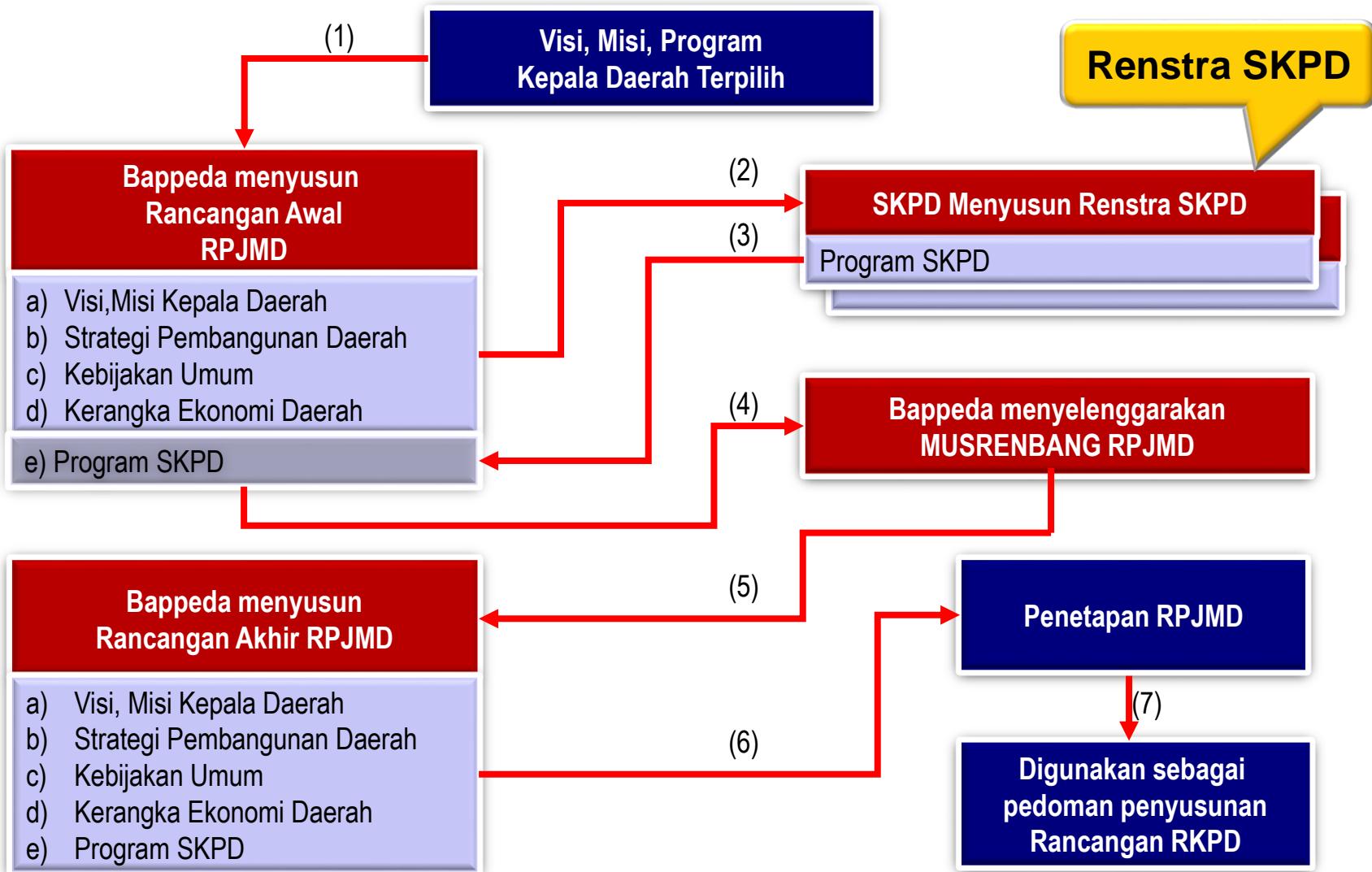
- 4.1 Visi SKPD
- 4.2 Misi SKPD
- 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)
- 4.4 Strategi
- 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAM

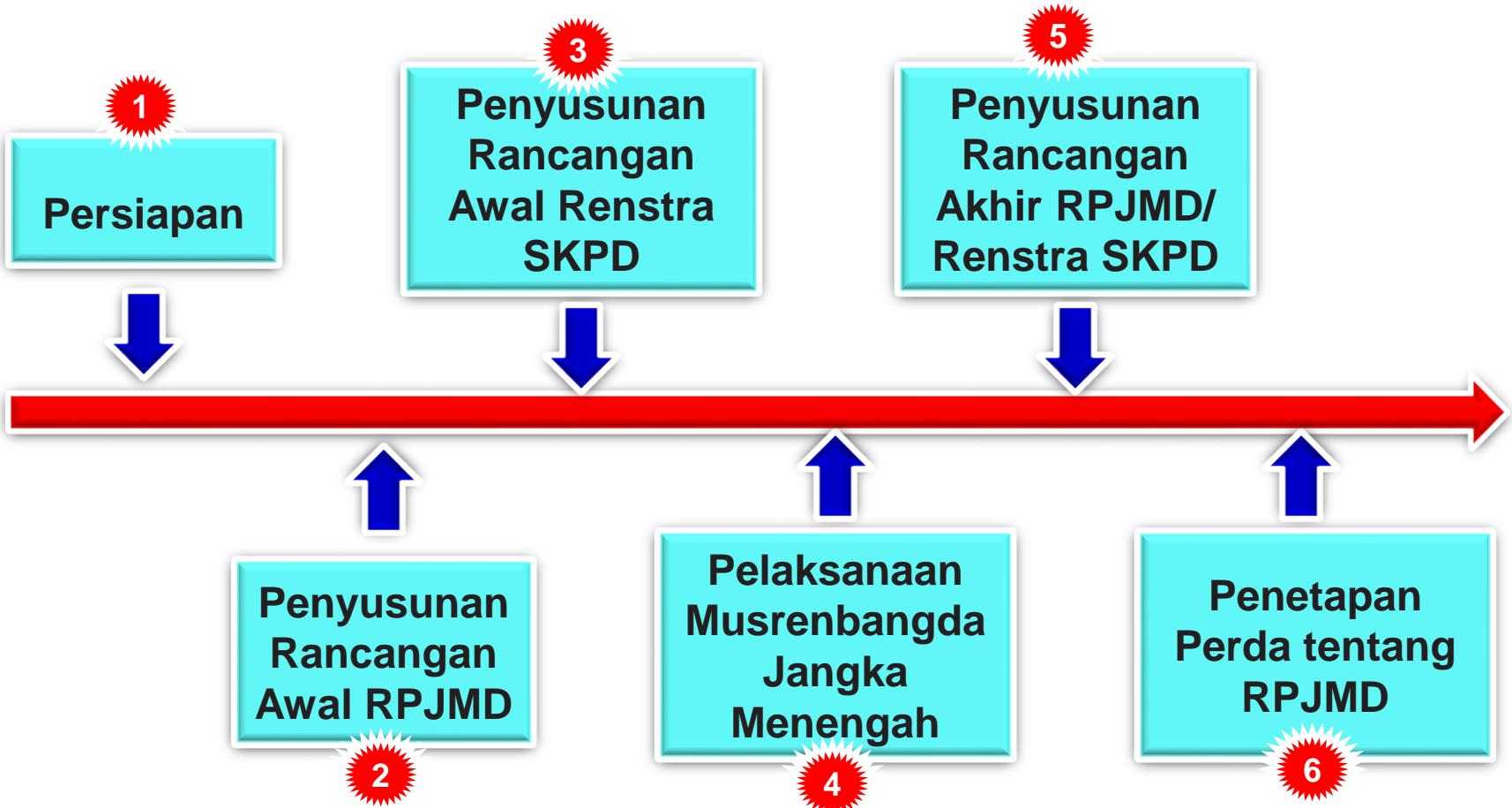
- 5.1 Program SKPD
- 5.2 Program Lintas SKPD
- 5.3 Program Lintas Kewilayahannya
- 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

BAB 6 PENUTUP

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD



Step by Step Penyusunan Renstra SKPD



Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahannya)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD



4

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

- Musrenbang RPJMD
- Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD



5

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD

- Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
- Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
- Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
- Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

- Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi
- Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
- Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
- Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
- Penetapan Ranperda menjadi Perda
- Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
- Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> . |
| 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> . |
| 3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: <ul style="list-style-type: none">▪ mengantisipasi perubahan-perubahan,▪ kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,▪ merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. | <input checked="" type="checkbox"/> . |

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

- | | |
|---|-----|
| 7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD. | ✓ . |
| 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD. | ✓ . |
| 9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD. | ✓ . |
| 10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. | ✓ . |
| 11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD | ✓ . |



Rencana Kerja SKPD

Apa Itu Renja SKPD?

- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
- Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.
- Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Sistematika Renja SKPD

- I. Pendahuluan;
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
- III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
- IV. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD;
- V. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif;
- VI. Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program dan Kegiatan; dan
- VII. Penutup.

Pasal 143 Permendagri 54/2010

Sistematika Penulisan Renja SKPD

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan

Pembangunan Daerah

- Pelayanan Umum
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi
- Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Fasilitas Umum
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pariwisata dan Budaya
- Perlindungan Sosial

Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

Pembangunan Daerah

- Kerangka Regulasi
- Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah

Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah)

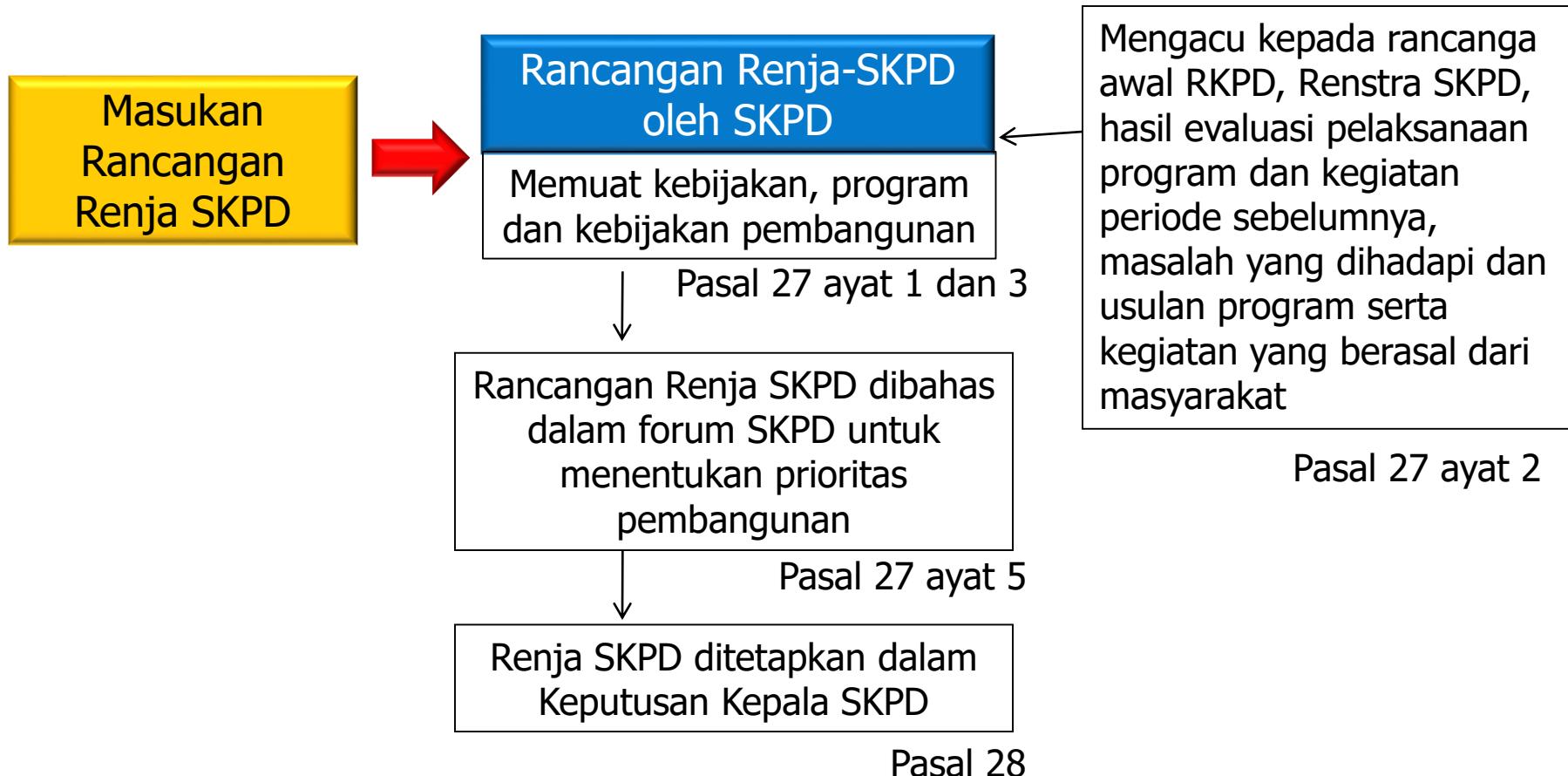
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah

Bab 6 Program dan Kegiatan

- Program SKPD
- Program Lintas SKPD
- Program Lintas Kewilayahan yang disusun menurut PERMENDAGRI No 13/2006 memuat informasi:
 - Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
 - Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
 - Kode SKPD
 - Kode Program
 - Kode Kegiatan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
- Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Bab 7 Penutup

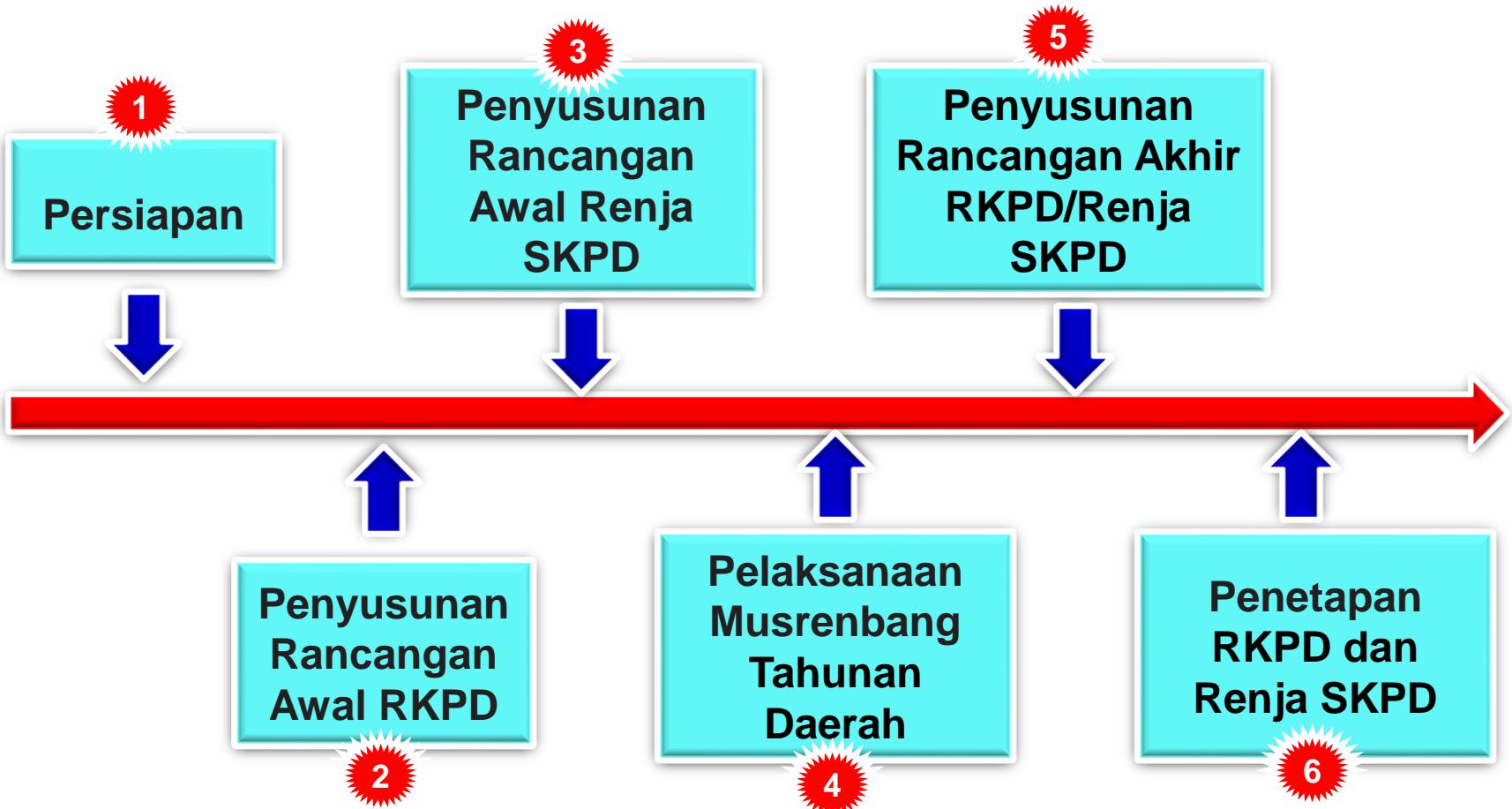
Penyusunan Renja SKPD



Penyusunan Renja SKPD

- RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.
- Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.

Step by Step Penyusunan Renja SKPD



Tahap Persiapan

- Orientasi Perencanaan Daerah
- Pembentukan Tim Penyusun RKPD
- Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD
- Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD
- Penetapan SK Tim Penyusun
- Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada NGS
- Identifikasi *stakeholders*
- Penentuan *stakeholders* untuk konsultasi publik
- penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan Musrenbang

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan
- Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)
- Pengumpulan Data/Informasi
- Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting
- Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
- Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD
- Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD
- Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- Formulasi Dokumen Rancangan RKPD
- Pembahasan Rancangan RKPD dengan SKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

- Review Renstra SKPD
- Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
- Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana
- SPM- standar pelayanan minimal
- Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana
- Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah

- MUSRENBANG Desa/Kelurahan
- Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/
Kelurahan
- MUSRENBANG Kecamatan
- Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan
- Pembahasan Forum SKPD
- Berita Acara kesepakatan Forum SKPD
- Musrenbang Daerah/RKPD
- Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

- Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
- Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PerKada RKPD
- Formulasi Ranc.Akhir RKPD
- Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Kepala SKPD

Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

- Penyerahan rancangan Peraturan Kepala SKPD ke Kepala SKPD
- Penetapan Peraturan Kepala SKPD
- Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Kepala Daerah
- Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
- Dokumen Renja SKPD (Peraturan Kepala SKPD)
- Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)

Evaluasi Kualitas Renja SKPD

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. | ✓ . |
| 2 | Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan. | ✓ . |
| 3 | Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. | ✓ . |

Evaluasi Kualitas Renja SKPD

- | | | |
|---|--|-----|
| 4 | Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat | ✓ . |
| 5 | Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI | ✓ . |
| 6 | Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari pelayanan SKPD | ✓ . |

Evaluasi Kualitas Renja SKPD

7	Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Standar Pelayanan Minimal	✓.
8	Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD	✓.

Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	3.7	8.1	8.3	8.7	9.0
Nusa Tenggara Timur	6.0	6.2	6.8	7.6	9.5

Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	16.9	15.6	14.4	13.2	12.0
Nusa Tenggara Timur	18.4	17.0	15.7	14.3	12.9

Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2
Nusa Tenggara Timur	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1



Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi NTT

PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Kupang*		

PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
1. Pengembangan Bandara Komodo 2. Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang		

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
1. Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo 2. Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca 3. Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende 4. Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere 5. Pengembangan Faspel Laut Marapokot 6. Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk mendukung Pariwisata 7. Pembangunan Pelabuhan TenauKupang* 8. Pengembangan Pelabuhan Maritaing 9. Pengembangan Pelabuhan Baing 10.Pengembangan Pelabuhan P.Salura		

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
11. Pengembangan Pelabuhan Kendidi/Reo 12. Pengembangan Pelabuhan Pota 13. Pengembangan Pelabuhan Maurole 14. Pengembangan Pelabuhan Atapupu 15. Pengembangan Pelabuhan Batutua 16. Pengembangan Pelabuhan Larantuka 17. Pengembangan Pelabuhan Terong 18. Pengembangan Pelabuhan Wulandoni 19. Pengembangan Pelabuhan Bari 20. Pengembangan Pelabuhan Ippi		

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Timor (Batuputih-Panite-Oinlausi-Boking-Motamasin)2. Pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-Riung-Megapanda-Maumere)3. Pembangunan Jalan Poros Tengah Kupang-Timor Tengah Utara (Oilmasi - Sulamo)4. Pembangunan Jalan Waingapu-Melolo-Baing (P. Sumba)5. Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste (Motomasin - Laktutus – Fatubesi – Dafala – Wedomu)		

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
<ul style="list-style-type: none">6. Pembangunan Jalan Perbatasan Poros Utara NTT - Timor (Faenake – Inbate – Inbate; Saenam – Nunpo; Saenam – Oenaek – Noelelo)7. Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - Eakun8. Pembangunan Jalan Seba - Mesara9. Pembangunan Jalan Terang - Bari - Kedindi10. Pembangunan Jalan Lakafehan - Keliting - Wini – Sakato11. Pembangunan Jalan Sp. Amol – Manamas12. Pembangunan Jalan Manamas – Wini13. Pembangunan Jalan Sp. Nurobo - Sp. Umasuker (Betun)		

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
14. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Soe – Kapan 15. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Kapan - Nenas - Sutual 16. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Sp. Tablolong - Oelalus – Oepaha 17. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Oepaha - Buraen - Teres – Rium 18. Pembangunan Jalan Waiwadan-Lite- Waewerang 19. Pembangunan Jalan Lato-Kawaliwu-Waiwio 20. Pembangunan Jalan Lewoleba-Loang		

ASDP

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Hansisi 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakalang 3. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kajadoi 4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wairiang (P. Lembata) 5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante		

ASDP

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maritaing*		
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waikelo*		
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pamana*		
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante*		

KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
<ol style="list-style-type: none">1. PLTMG Kupang Peaker 40 MW2. PLTMG Maumere Peaker 40 MW3. PLTG/MG Mobile PP NTT (Kupang) 30 MW4. PLTU Timor 1 2x25 MW5. PLTP Mataloko (FTP 2) 20 MW6. PLTMG Waingapu 10 MW7. PLTMG Alor 10 MW8. Pengembangan PLT Energi Arus Laut (Pilot Project)9. Pengembangan EBT Sumba Iconic Island10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Bendung Linamnutu D.I. Bena Kab. TTS2. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (1.225 Ha) Kab. Manggarai Timur3. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Mbaiting Kab. Sumba Timur4. Pembangunan Waduk Raknamo Kab. Kupang5. Pembangunan Waduk Jawa Tiwa (Multi Years) Kab. Nagekeo		

PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan untuk mencapai target pemerataan dan jangkauan pendidikan sebaiknya mempertimbangkan persoalan karakter wilayah, potensi wilayah, dan keunggulan lokal., Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah, Keterpaduan/sinergi pembangunan antar sektor terutama pada daerah yang terisolir2. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk SATAP SMP-SMA, termasuk perpustakaan dan laboratorium3. Meningkatkan jaminan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat		

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan sosialisasi dan advokasi KB berbasis desa2. Penyediaan tenaga PLKB bagi daerah dengan TFR yang tinggi3. Pembangunan KB harus dilakukan secara terpadu lintas sektor4. Peningkatan alokasi untuk program KB5. Peningkatan alokasi dana untuk mendukung upaya kesehatan promotif dan preventif dengan basis Posyandu6. Peningkatan pelayanan 1000 hari pertama kehidupan balita dan anak, terutama pada wilayah rawan gizi.		

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
7. Peningkatan pelayanan kesehatan gugus pulau terutama pulau-pulau berpenghuni terisolir 8. Peningkatan eliminasi Malaria di wilayah endemis 9. Pengembangan sistem rujukan regional 10. Peningkatan rasio tenaga kesehatan, terutama untuk daerah yang jarang penduduknya 11. Peningkatan layanan kualitas kesehatan melalui sistem Sister Hospital 12. Peningkatan dukungan pengembangan Fakultas Kedokteran UNDANA 13. Dukungan pembangunan Rumah Sakit regional di Kupang, Waingapu, dan Maumere/Ende		

PERUMAHAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Lembata
1. Bantuan stimulan pembangunan/ peningkatan kualitas rumah swadaya layak huni		



Multilateral Meeting



Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan pangan
 2. Kedaulatan energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi mental
 7. Kawasan Perbatasan



1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag;
Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda

Peningkatan
kemampuan
petani
Pemb.
Agribisnis
kerakyatan

Bank Indonesia;
Kemen Koperasi

Pendirian bank
pertanian &
UMKM

dadang-solihin.blogspot.com

Pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria
9 juta Ha

Perbaikan dan
pemb. Jaringan
irigasi,
bendungan,
pasar, dan
sarpras
transportasi

Kemen PU;
Kementerian
Kemendag;
Pemda

Stop konversi
lahan produktif

Pemda:
Kemen Agraria & TTR

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
**KEDAULATAN
PANGAN**

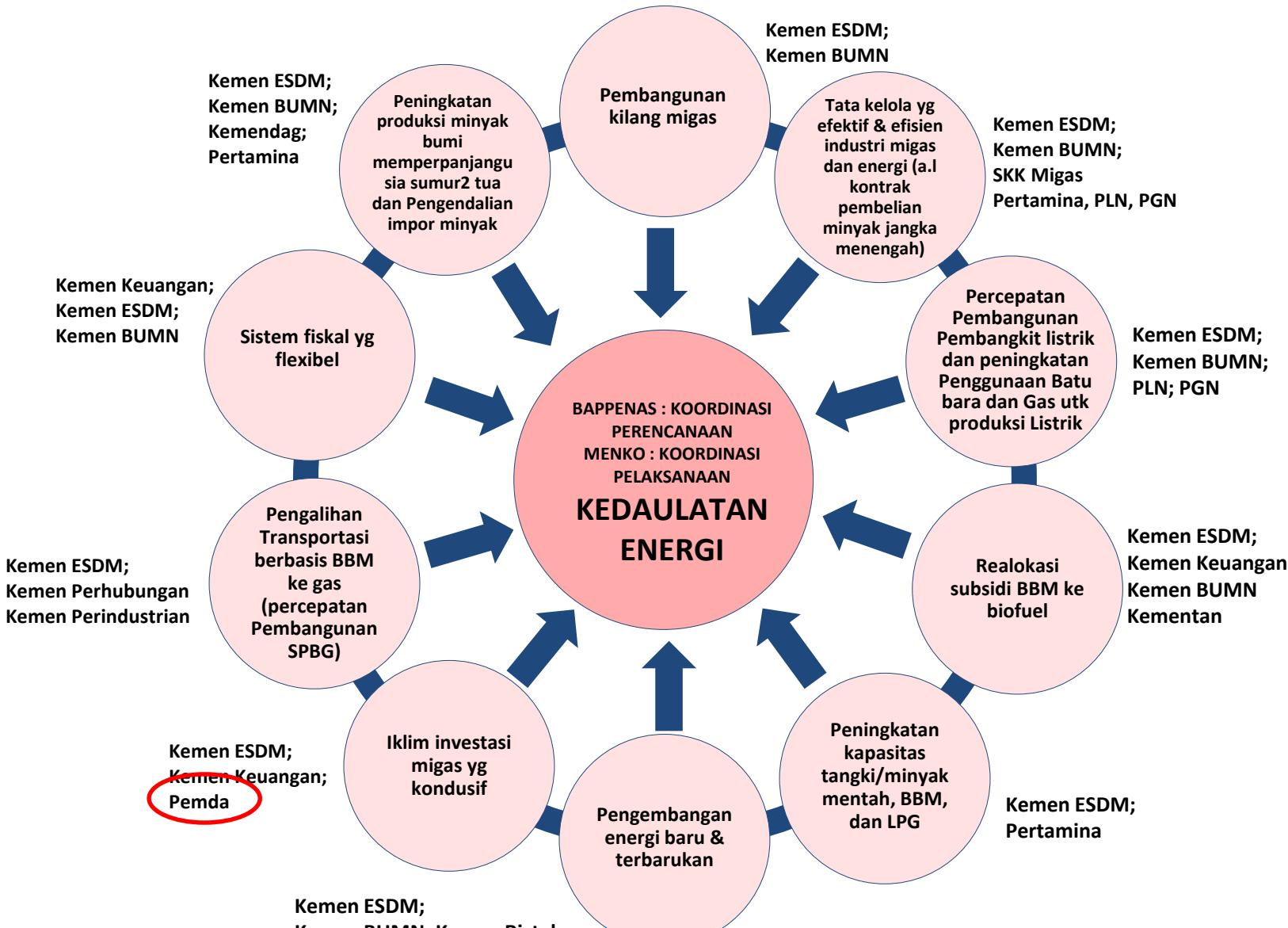
Gudang dgn
fasilitas
pengolahan
pasca panen
di sentra
produksi;

Pemulihan
kualitas
kesuburan
lahan; 1000
Desa Mandiri
Benih

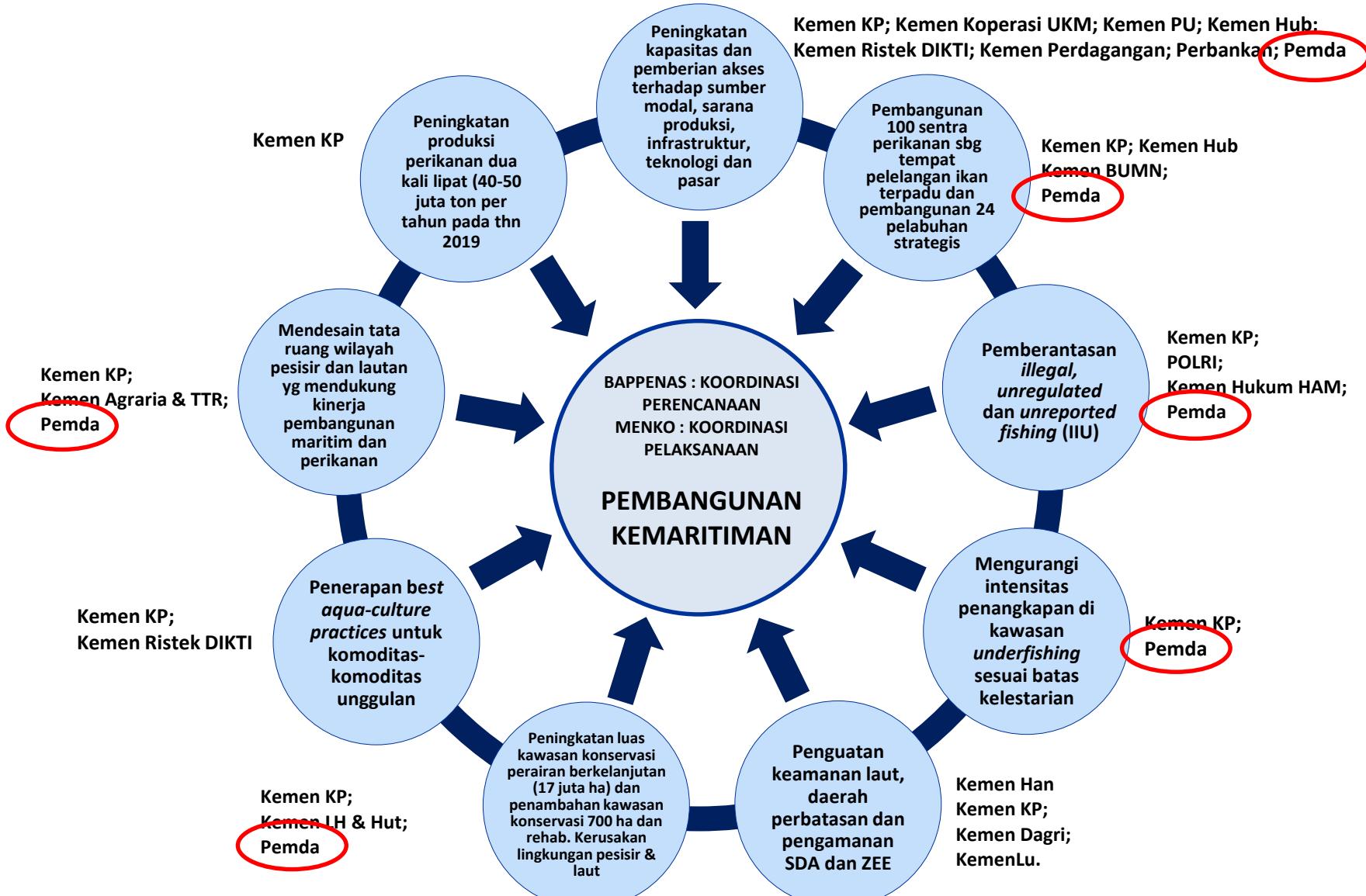
Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; **Pemda**

Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)

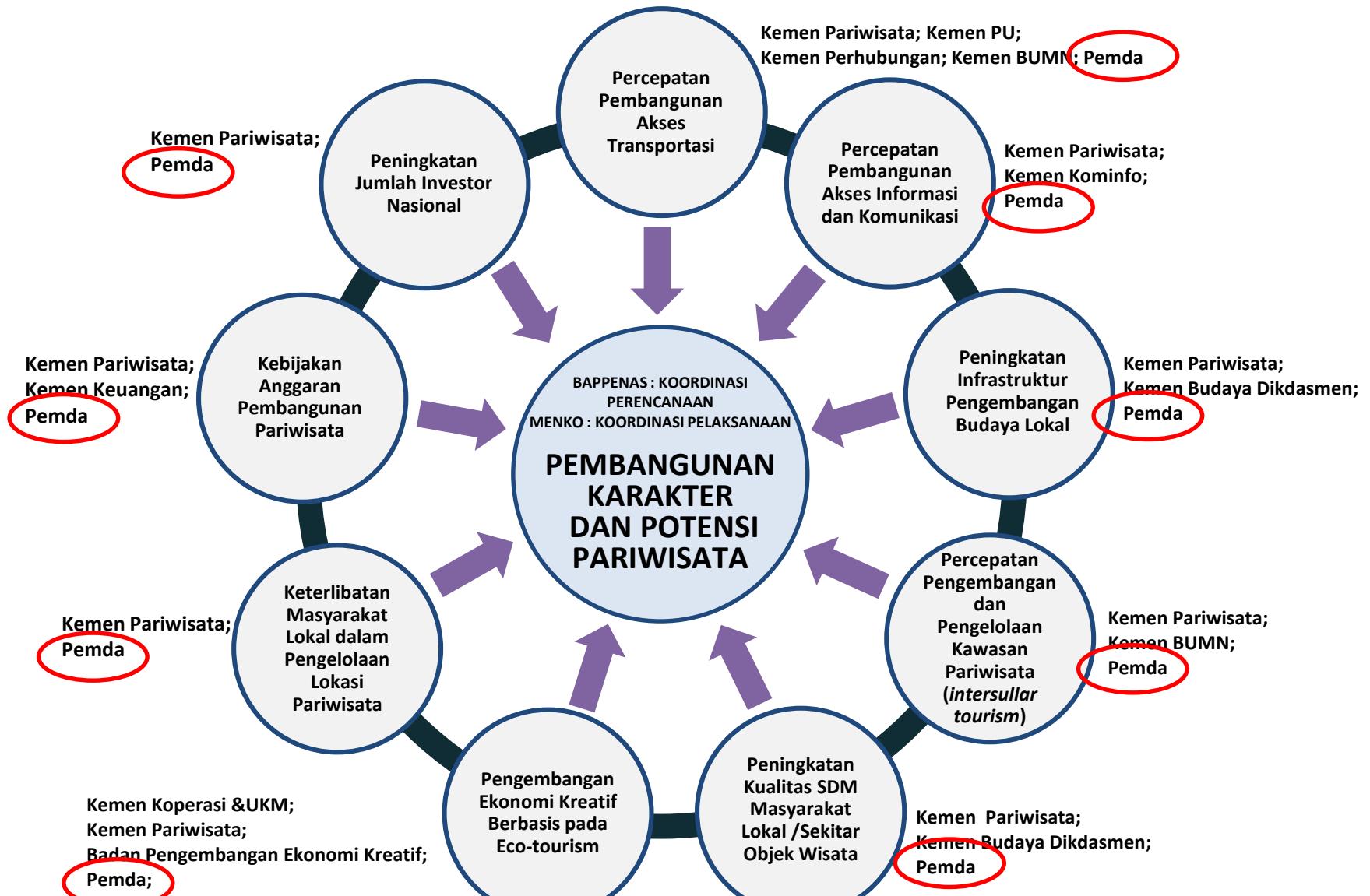
2. Kedaulatan Energi



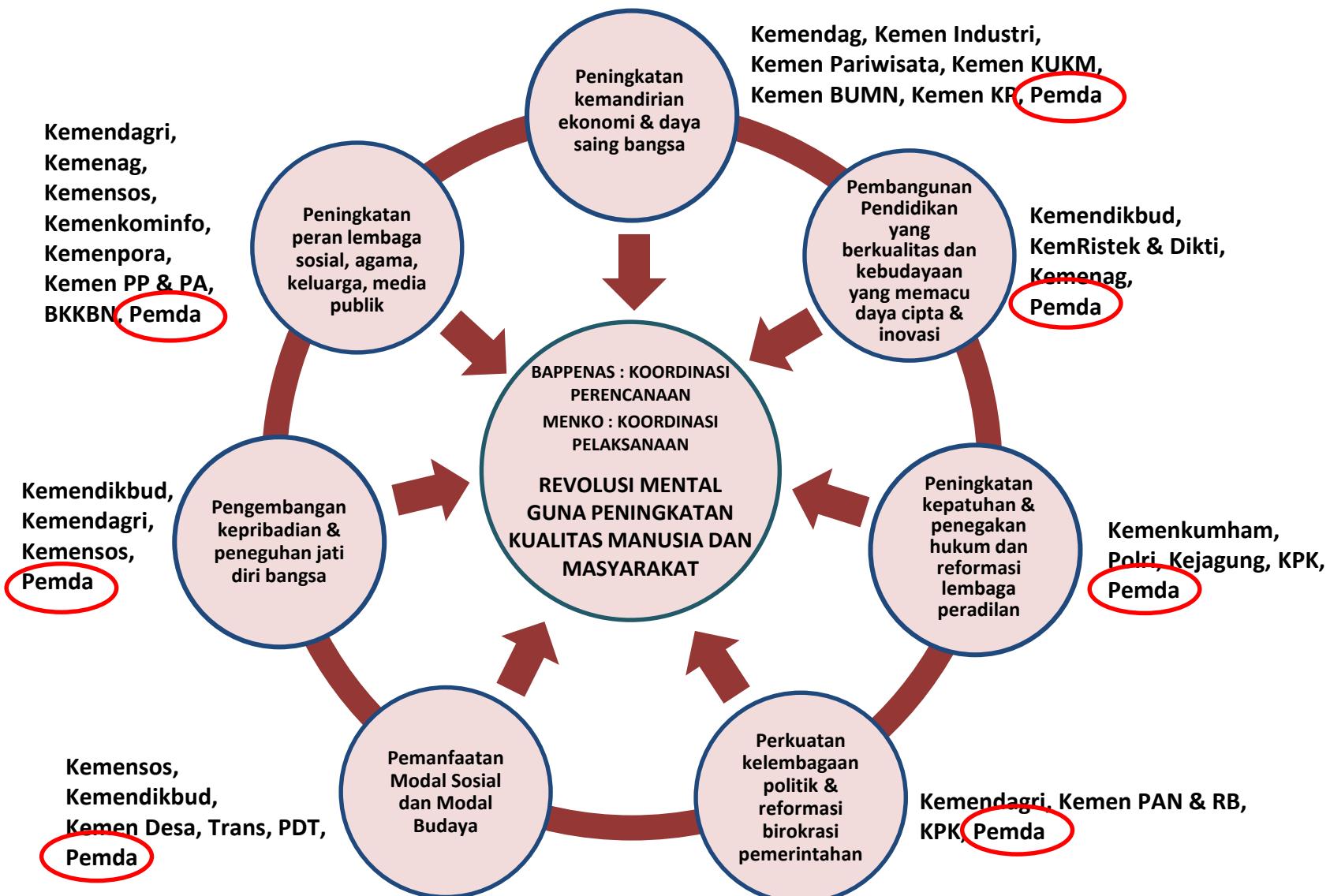
3. Kemaritiman



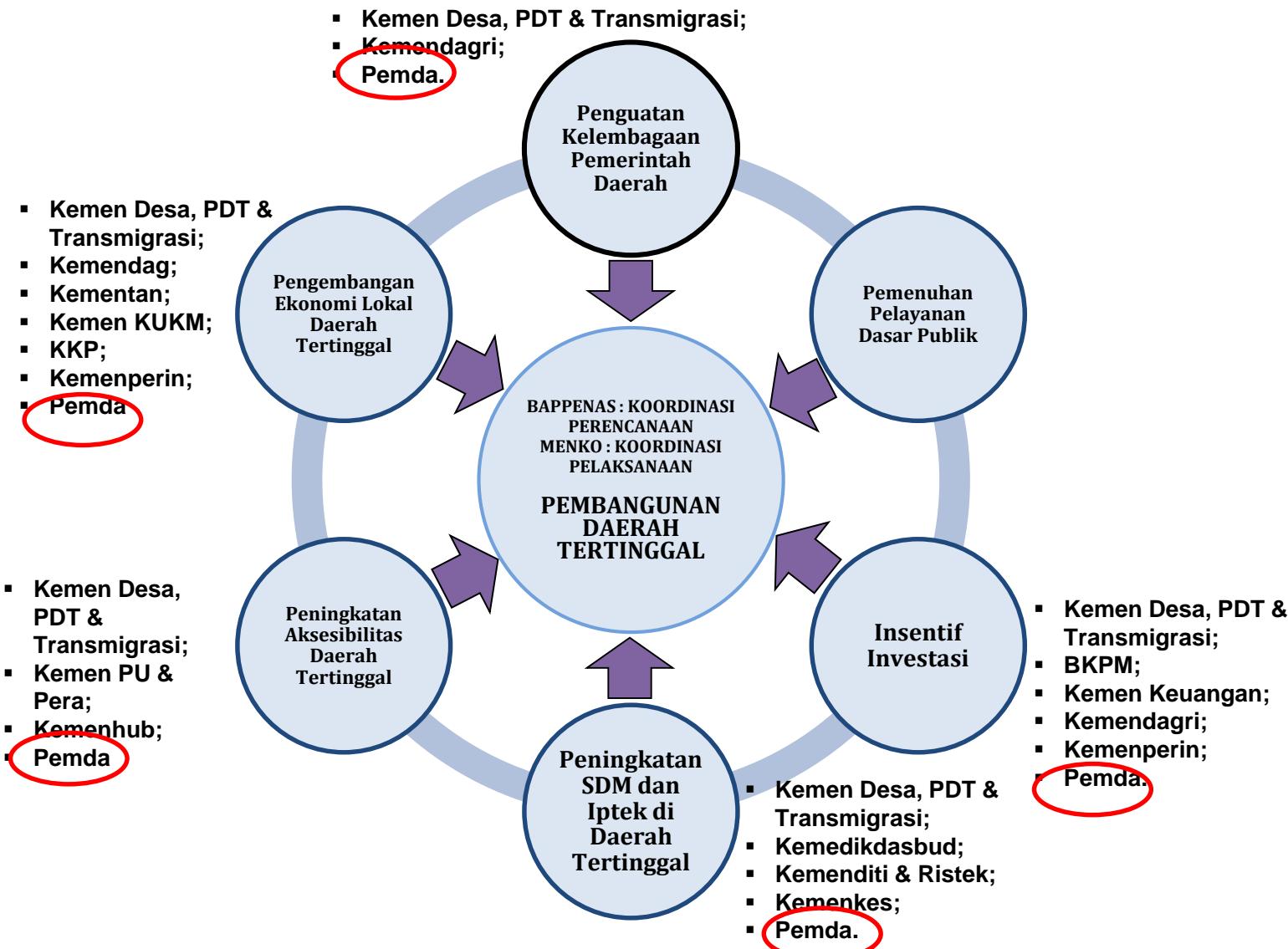
5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



6. Revolusi Mental



7. Pembangunan Daerah Tertinggal



Terima Kasih

